



KKP
2026
#GROWSTRONGER

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Loka Riset Budidaya Rumput Laut

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Triwulan II Tahun 2026" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Loka Riset Budidaya Rumput Laut atas target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

Laporan Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut Triwulan II Tahun 2026 memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja LRBRL Tahun 2026. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan beserta analisisnya.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, untuk itu masukan serta saran yang membangun kami harapkan untuk peningkatan kualitas Laporan Kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.

Boalemo, 21 Juli 2026
Kepala LRBRL

Rini Ponto, S.T

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
1. PENDAHULUAN	10
1.1. LATAR BELAKANG	10
1.2. TUJUAN	12
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	12
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA	16
1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN	18
1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	19
2. PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. RENCANA STRATEGIS	21
2.1.1. VISI.....	22
2.1.2. MISI	22
2.1.3. TUJUAN	23
2.1.4. SASARAN KEGIATAN	23
2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	26
2.3. PERJANJIAN KINERJA	28
2.4. PENGUKURAN KINERJA	29
3. AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. PRESTASI KINERJA	31
3.2. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA	31
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	50
3.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA	53
3.4.1. EFISIENSI ANGGARAN	53
3.4.2. ALOKASI SUMBER DAYA	54
4. PENUTUP.....	55
4.1. CAPAIAN KINERJA	55



4.2. PERMASALAHAN	57
4.3. REKOMENDASI	57
4.4. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI TRIWULAN II TAHUN 2025	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

1. Capaian Kinerja LRBRL Triwulan II tahun 2026	7
2. Rancangan Indikator dan Target Kinerja LRBRL Tahun 2025-2029	25
3. Revisi Rancangan Indikator dan Target Kinerja LRBRL Tahun 2025-2029	27
4. Revisi DIPA LRBRL Triwulan I Tahun 2026.....	27
5. Rencana Kerja LRBRL Triwulan II 2026	27
6. Perjanjian Kinerja LRBRL Tahun 2026.....	28
7. Capaian IKK LRBRL Triwulan II tahun 2026	32
8. Capaian IKK 1 LRBRL Triwulan II tahun 2026	33
9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dengan Satker Setingkat Loka	35
10. Capaian IKK 2 LRBRL Triwulan II tahun 2026.....	36
11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dengan Satker Setingkat Loka	37
12. Capaian IKK 5 LRBRL Triwulan II Tahun 2026.....	41
13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRBRL dengan Satker Setingkat Loka	42
14. IKK 6 LRBRL Triwulan II tahun 2026	44
15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL dengan Satker Setingkat Loka	45
16. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2026.....	50
17. Revisi DIPA LRBRL Triwulan II tahun 2026.....	50
18. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan II tahun 2026	51
19. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Triwulan II tahun 2026	53
20. Capaian IKK LRBRL Triwulan II tahun 2026	56
21. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan II Tahun 2026	58



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi Loka Riset Budidaya Rumput Laut.....	13
2. Komposisi Pegawai LRBRL Berdasarkan Status Kepegawaian	16
3. Komposisi Pegawai ASN LRBRL Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
4. Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan.....	17
5. Dashboard Kinerja Level 3 LRBRL Gorontalo.....	31
6. Dashboard Kinerja Level 3 LRBRL Gorontalo.....	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan II tahun 2026, LRBRL memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pada sasaran kegiatan tersebut, LRBRL bertanggungjawab terhadap Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL, Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL, Indeks Profesionalitas ASN LRBRL, Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL, Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL, Keterbukaan Informasi Publik LRBRL.

Pengukuran capaian kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Triwulan II tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) menggunakan aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Loka Riset Budidaya Rumput Laut memiliki 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan, 4 (empat) indikator kinerja telah mencapai target dan capaian pada Triwulan II tahun 2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh data capaian kinerja LRBRL Triwulan II tahun 2026 sebesar 114,44 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja LRBRL Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	%	Status
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	86,00	86,00	100,00	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan	92,10	99,91	120,00	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	%	Status
	Anggaran LRBRL (Nilai)				
	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80,00			
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,75			
	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,55	76,00	117,76	
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	77,00	100	120,00	
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL (Nilai)	71,00			
	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2,00			
	Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90,00			

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp1.376.350.260,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau sekitar 53,45% dari total pagu anggaran sebesar Rp2.574.875.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada Triwulan II tahun 2026 yaitu kurangnya jumlah SDM yang melaksanakan kegiatan manajerial sehingga pegawai yang ada harus melakukan rangkap tugas dan juga dikhawatirkan



menimbulkan resiko tinggi yang berdampak pada capaian kinerja LRBRL. Berdasarkan permasalahan yang terjadi selama proses pencapaian target kinerja Triwulan II Tahun 2026 yaitu memberikan tugas tambahan kepada pegawai dari bidang tugas lainnya serta menyampaikan kebutuhan ASN agar diberikan penambahan jumlah SDM untuk mengisi kekosongan jabatan atau tugas di LRBRL baik dari penerimaan CPNS, PPPK atau dari mutasi pegawai yang berasal dari sakter lain.

Dalam rangka mendorong pencapaian kinerja yang optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan, beberapa catatan perlu diperhatikan diantaranya :

1. Indikator kinerja yang capaiannya baru diukur semesteran dan tahunan tetap dilakukan pengawalan dengan melakukan monitoring terhadap progres capaian.
2. Meningkatkan realisasi anggaran LRBRL dengan melakukan penelaahan terhadap pagu anggaran belanja pegawai serta percepatan penyerapan belanja barang.
3. Dilakukan monitoring pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab IKU.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut tertanggal 28 Desember 2020 merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset budidaya rumput laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Loka Riset Budidaya Rumput Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan riset budidaya rumput laut. LRBRL berlokasi di Jalan Pelabuhan Etalase Perikanan, Desa Tabulo Selatan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset budidaya rumput laut dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang riset budidaya rumput laut;
2. Pelaksanaan penelitian budidaya rumput laut di bidang sumber daya, biologi, bioteknologi, ekologi, dan lingkungan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama riset;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana riset;
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, LRBRL diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;

2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, LRBRL sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja Triwulan II tahun 2026 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai, kemudian dituangkan ke dalam susunan LKj Triwulan II LRBRL Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Dasar hukum penyusunan laporan akuntabilitas kinerja LRBRL Triwulan II tahun 2026 Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah :

1. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Perpres 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDM

1.2. TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja memiliki dua tujuan, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Trwulan II tahun 2026.
2. Melakukan perbaikan berkesinambungan bagi LRBRL dalam meningkatkan kinerjanya.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Loka Riset Budidaya Rumput Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset budidaya rumput laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Loka Riset Budidaya Rumput Laut mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan riset budidaya rumput laut.

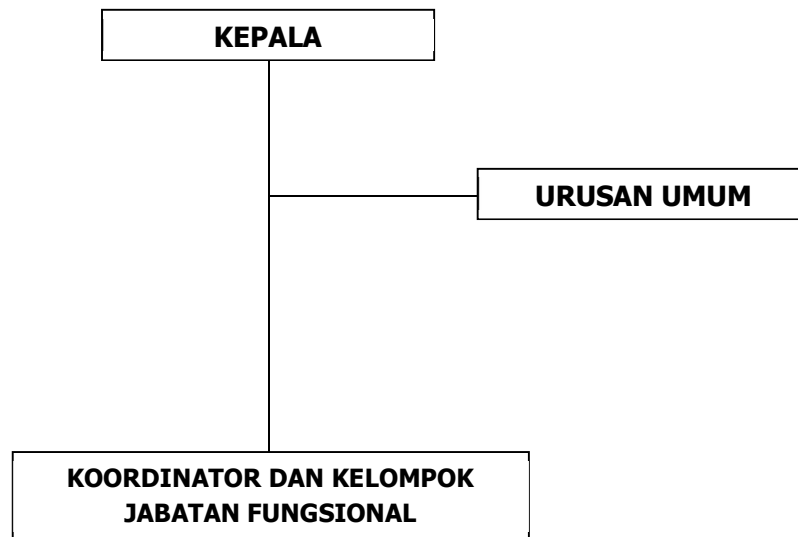
Loka Riset Budidaya Rumput Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya rumput laut;
2. Pelaksanaan penelitian budidaya rumput laut dibidang sumber daya, biologi, bioteknologi, ekologi dan lingkungan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerjasama riset;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana riset;

5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut, struktur organisasi LRBRL dipimpin oleh seorang Kepala Loka dan dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok jabatan fungsional (Pranata Humas dan Pranata Keuangan APBN) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Budidaya Rumput Laut sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Riset Budidaya Rumput Laut

(Sumber : Permen KP Nomor 84/PERMEN-KP/2020)

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam

bentuk Surat Tugas untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada Loka Riset Budidaya Rumput Laut sesuai dengan surat tugas Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut nomor B.29/LRBRL/KP.440/I/2026 tanggal 12 Januari 2026. Susunan keanggotaan Tim Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut hasil perhitungan analisis beban kerja pegawai. Susunan Tim kerja LRBRL hanya terdiri dari 1 tim kerja, yaitu Dukungan Manajerial. Adapun uraian fungsi Tim Kerja Dukungan Manajerial Loka Riset Budidaya Rumput Laut antara lain :

- a) Koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen usulan kegiatan dan anggaran, penyusunan Manajemen Resiko (MR), pengelolaan belanja pegawai, perencanaan kebutuhan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, realisasi keuangan, laporan perbendaharaan dan akuntansi, penyampaian SPT, laporan keuangan, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), penyiapan dokumen keperluan pengawasan aparat fungsional (internal dan Eksternal/ Itjen KKP, BPK dan BPKP) dan tindak lanjutnya serta penataan dokumen keuangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- b) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- c) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan program, kebijakan, kegiatan, dan anggaran kelautan dan perikanan, Pendampingan perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaporan kegiatan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- d) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyusunan pengukuran kinerja anggaran dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- e) Koordinasi dan pelaksanaan penyiapan dokumen keperluan Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN), Penilaian Kinerja pegawai (target, realisasi, bukti dukung, penilaian perilaku dan pencetakan), perubahan status administrasi kepegawaian (KP, KGB, Mutasi, Pensiun, Penghargaan, sumpah PNS, Ujian Dinas, Penyesuaian Ijazah, peningkatan kapasitas pegawai (Diklat), Data Simpeg, perkawinan dan perceraian), pakta integritas,

rekapitulasi dan evaluasi kedisiplinan pegawai, dokumen peta jabatan dan analisis beban kerja, daftar pemangku, nama jabatan dan kelas jabatan dalam rangka penataan pegawai, LHKPN, benturan kepentingan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

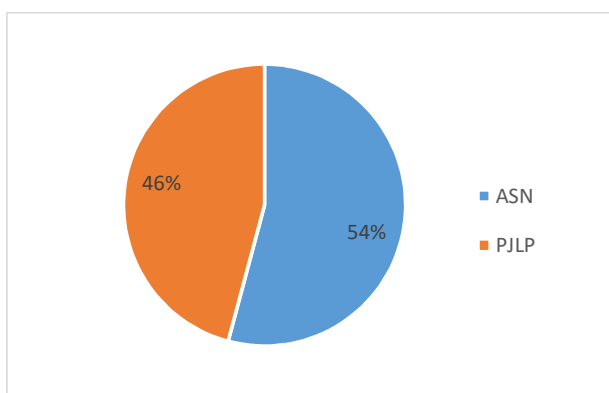
- f) Koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- g) Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan kearsipan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- h) Koordinasi, persiapan dan pelaksanaan penyiapan dokumen kemitraan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan
- i) Koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan informasi, kehumasan dan pelayanan publik serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Kelompok jabatan fungsional pada Loka Riset Budidaya Rumput Laut sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terdiri dari pranata humas ahli pertama dan pranata keuangan APBN mahir. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2021 Tentang BRIN, mekanisme pengintegrasian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari KKP ke BRIN maka telah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai dari KKP ke BRIN (Peneliti dan Teknisi Litkayasa) pada tanggal 17 Juni 2022.

Pada Tahun Anggaran 2023, LRBRL tidak menjalankan tugas riset karena adanya transisi tugas dan fungsi terkait dengan kebijakan integrasi penelitian, pengembangan, dan uji terap (litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kegiatan yang dijalankan oleh LRBRL berupa kegiatan dukungan manajerial. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Loka Riset Budidaya Rumput Laut secara teknis berada di bawah binaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

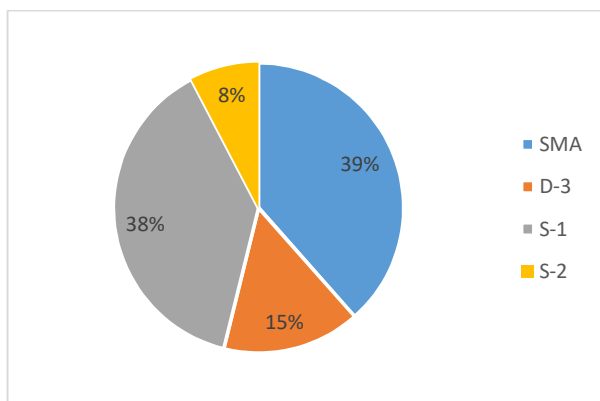
1.4. KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan status kepegawaian, pegawai LRBRL pada Triwulan II tahun 2026 memiliki 24 pegawai dengan rincian sebagai berikut : ASN sebanyak 13 orang (52%) dan PJLP sebanyak 11 orang (48%). Dukungan sumber daya manusia pada kegiatan dukungan manajerial dan kegiatan strategis lainnya berdasarkan status kepegawaian pada Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 2.



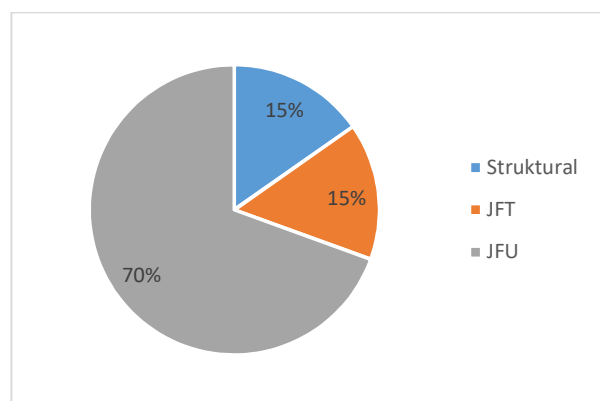
Gambar 2. Komposisi Pegawai LRBRL Berdasarkan Status Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara (ASN) LRBRL menurut tingkat pendidikan pada Triwulan II tahun 2026 (Gambar 3), pengelompokan tingkat pendidikan ASN didominasi oleh lulusan SMA dan Strata-1 dengan persentase masing-masing sebanyak 38,50% dari total 13 pegawai, sedangkan pegawai dengan lulusan Diploma-3 dan Strata-2 pada LRBRL persentase masing-masing sebanyak 15,4% dan 7,69%. Pengelompokan pendidikan PJLP LRBRL paling banyak lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persentase 43%. Sampai dengan periode saat ini LRBRL belum memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan Strata 3 (S-3), sehingga diharapkan diberikan perhatian khusus dari pusat untuk bisa memfasilitasi pegawai di LRBRL untuk melaksanakan tugas atau ijin belajar S-3.



Gambar 3. Komposisi Pegawai ASN LRBRL Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai ASN non-fungsional di LRBRL lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai ASN fungsional (Gambar 4). Jabatan Struktural di LRBRL sebanyak 2 orang (15%) yaitu Kepala LRBRL dan Kepala Urusan Umum. Jabatan fungsional di LRBRL sebanyak 2 orang (15%) yaitu Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama dan Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir. Sedangkan jabatan fungsional umum sebanyak 9 orang (70%) yang meliputi Pengolah Data dan Informasi, Penelaah Teknis Kebijakan, Pengadministrasi Perkantoran, Penata Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional dan Operator Layanan Operasional.



Gambar 4. Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

Pengelompokan pegawai LRBRL berdasarkan gender dari jumlah 13 ASN yang terdapat di LRBRL, 62% (8 orang) diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki dan 38% (5 orang) berjenis kelamin perempuan. Sedangkan dari total 11 PJLP yang

terdapat di LRBRL, 82% (9 orang) diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki dan 18% (2 orang) berjenis kelamin perempuan.

1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja LRBRL pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) TA 2026 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) Triwulan II 2026. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LKj adalah sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**, menyajikan ucapan syukur dan terima kasih, tujuan dan harapan penyusunan laporan kinerja Triwulan II tahun 2026.
- **Ringkasan Eksekutif**, Menyajikan uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan II tahun 2026.
- **I – Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tujuan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan SDM dan sistematika pelaporan.
- **II – Perencanaan Kinerja**, menyajikan rencana strategis Triwulan II tahun 2026, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja Triwulan II tahun 2026.
- **III – Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan II tahun 2026, dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.
- **IV – Penutup**, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja Triwulan II tahun 2026.
- **Lampiran**

1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

1. Adanya kecenderungan penggunaan sumberdaya rumput laut sebagai bahan bio farmakologi;
2. Adanya perubahan fungsi pangan untuk kesehatan dan pencegahan penyakit menuntut riset pangan fungsional berbasis sumber daya hayati perairan (rumput laut).
3. Pertumbuhan penduduk sebagai modal SDM dan potensi meningkatkan produktivitas rumput laut;
4. Isu lingkungan (sampah plastik di laut, karbon biru dan kesehatan laut) serta pengelolaan perikanan (IUUF) dalam wilayah regional membutuhkan rekomendasi kebijakan BRSDM KP.
5. Peluang pasar hasil produksi dan olahan rumput laut baik nasional maupun internasional masih sangat tinggi
6. Masih banyak jenis rumput laut bernilai ekonomi yang belum dikaji, pelaku pembudidaya rumput laut di Indonesia yang memerlukan binaan dan input teknologi, dan peluang kerjasama budidaya rumput laut dan komoditas perikanan lainnya dengan stakeholder di dalam dan luar negeri.
7. LRBRL merupakan satu-satunya UPT Pemerintah yang fokus pada riset budidaya rumput laut di Indonesia

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset LRBRL untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

1. Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai *quick win* pembangunan sektor KP;
2. Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI) untuk meningkatkan kapasitas



riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (*resource sharing*);

3. Masih kurangnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang riset dan SDM sebagai instrumen penjaminan mutu riset dan pengembangan SDM;
4. Sarpras riset belum memenuhi kebutuhan riset dan SDM;
5. Belum tersedianya regulasi pendukung serta terbatasnya kemampuan melakukan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset untuk kebutuhan industri;
6. Penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
7. Jumlah sumber daya manusia LRBRL yang sangat minim dan pengembangan sumber daya manusia LRBRL yang belum optimal.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) tahun 2025-2029 berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arahan bagi penyelenggaraan penelitian budidaya Rumput laut dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan selama periode Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) LRBRL tahun 2025-2029, mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Renstra ini berfungsi sebagai instrument untuk mengelola segala sumber daya yang ada untuk menyusun perkiraan-perkiraan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai sebuah dokumen perencanaan maka selanjutnya renstra memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi terkini terutama terkait adanya perubahan kebijakan. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah adanya proses evaluasi secara berkesinambungan sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan. Evaluasi ini dilakukan untuk menanggapi perubahan kondisi lingkungan strategis aktual yang terjadi di lingkup nasional, kementerian, atau sub sektor perikanan budidaya itu sendiri. Rencana Strategis (Renstra) LRBRL tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan menunggu SOTK baru.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

BPPSDM memiliki mandat untuk penyiapan sumber daya manusia KP yang kompeten melalui penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan, serta pelatihan yang dilakukan terpadu dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mandat tersebut



harus diikuti penyusunan rencana strategis yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Hal ini akan mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan sektor KP di Indonesia melalui pengembangan SDM yang kompeten.

2.1.1. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Visi Presiden 2025-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden.

Visi KKP 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

BPPSDM KP mempunyai visi spesifik yaitu "Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan". Visi yang ditetapkan LRBRL pada tahun 2025-2029 adalah "Profesional dalam Penyediaan Teknologi Budidaya Rumput Laut Guna mendukung Target Produksi Rumput Laut Indonesia" merupakan penajaman dari visi BPPSDMKP serta mendukung visi KKP "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

2.1.2. Misi

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. BPPSDMKP melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" yang melaksanakan Asta Cita 4. Dalam dukungan terhadap

pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”.

Misi LRBRL merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi LRBRL Adapun misi dari LRBRL yaitu:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentrasentra produksi kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2.1.3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LRBRL, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
2. Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP terdiri dari :

- SS-1 Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut
- SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional
- SS-4 Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan
- SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas

Dengan memperhatikan misi KKP dan tujuan BPPSDM tahun 2025-2029, maka sasaran program (SP) yang akan dicapai BPPSDM pada Tahun 2025-2029 mengacu pada

- SP-1 Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- SP-2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP

Dengan memperhatikan misi dan tujuan Loka Riset Budidaya Rumput Laut tahun 2025-2029, maka sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 mengacu pada Sasaran Strategis KKP dan Sasaran Program BPPSDM KP, maka sasaran kegiatan yang diturunkan ke Loka Riset Budidaya Rumput Laut yaitu:

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Dengan mengacu pada sasaran kegiatan Sekretariat BPPSDM yang telah diturunkan (cascading) ke level 3 LRBRL, maka sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan LRBRL tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Indikator Kinerja Kegiatan adalah:
 - 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dengan target 86% pada tahun 2026;
 - 2) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dengan target nilai 92,10 pada tahun 2026;
 - 3) Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL dengan target nilai 80 pada tahun 2026;
 - 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL dengan target nilai 71,75 pada tahun 2026;
 - 5) Indeks Profesionalitas ASN LRBRL dengan target 81,55 pada tahun 2026;
 - 6) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL dengan target 77% pada tahun 2026;

- 7) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL dengan target Nilai 71 pada tahun 2026;
- 8) Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL dengan target 2 kemitraan pada tahun 2026;
- 9) Keterbukaan Informasi Publik LRBRL dengan target 90% pada tahun 2026;

Sebagai acuan sementara menggunakan Rancangan Indikator dan Target Kinerja LRBRL Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Rancangan Indikator dan Target Kinerja LRBRL Tahun 2025-2029

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Dukungan Manajemen BPPSDMKP	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	85	86	87	88	89
			2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2
			3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80	80,1	80,15	80,2	80,2
			4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,5	81,75	82	82,25	82,5
			5.	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,5	81,55	81,6	81,65	81,7
			6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	80	77	82	83	84
			7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)	80	81	82	83	84
			8.	Nilai PNBPN LRBRL (Rupiah)	26.500.000	30.008.000	32.600.000	35.900.000	39.500.000
			9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2	3	3	4	4
			10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100	100	100	100	100
			11.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90	90,1	90,15	90,2	90,2

Berdasarkan target pada perjanjian kinerja LRBRL tahun 2026, pada Januari 2026 telah dilakukan revisi Rancangan Indikator dan Target Kinerja LRBRL Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Revisi Rancangan Indikator dan Target Kinerja LRBRL Tahun 2025-2029

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPSDMKP	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	85	86	87	88	89
			2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92	92,1	92,15	92,2	92,2
			3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80	80	80,15	80,2	80,2
			4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,5	71,75	71,80	71,85	71,90
			5.	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,5	81,55	81,6	81,65	81,7
			6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	80	77	78	79	80
			7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN LRBRL (%)	80	-	-	-	-
			8.	Nilai PNPB LRBRL (Rupiah)	26.500.000	-	-	-	-
			9.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2	2	3	4	4
			10.	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya LRBRL (%)	100	-	-	-	-
			11.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90	90	90,1	90,15	90,2
			12.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Nilai)	-	71	71,1	71,15	71,2

2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kerja Tahunan merupakan dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. LRBRL pada awal tahun 2026 mengelola anggaran

sebesar Rp2.742.305.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Pada tanggal 24 April 2026 dilakukan revisi anggaran dalam rangka penajaman belanja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Tahun Anggaran 2026, sehingga pagu anggaran LRBRL menjadi sebesar Rp2.574.875.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Selama Triwulan II tahun 2026 telah dilakukan revisi terhadap DIPA LRBRL sebanyak 4 kali yang dijelaskan pada tabel 4.

Tabel 4. Revisi DIPA LRBRL Triwulan I Tahun 2026

Revisi	Tanggal	Tema Revisi	Pagu Revisi (Rp)
1	2	3	4
DIPA 01	31 Desember 2025	Revisi RO Khusus	2.742.305.000
DIPA 02	18 Februari 2026	Revisi Halaman III DIPA	2.742.305.000
DIPA 03	24 April 2026	Penajaman Belanja lingkup BPPSDMKP TA 2026	2.574.875.000
DIPA 04	8 Mei 2026	Revisi Halaman III DIPA	2.574.875.000

Rencana Kerja LRBRL Triwulan II tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rencana Kerja LRBRL Triwulan II 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92,1
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,75

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,55
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	77
		7.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL (Nilai)	71
		8.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2
		9.	Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan antara Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada tanggal 7 Januari 2026, LRBRL mengelola anggaran sebesar Rp2.742.305.000,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah). Pada tahun 2026, LRBRL melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja LRBRL Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92,1

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3.	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,55
		6.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	77
		7.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL (Nilai)	71
		8.	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2
		9.	Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90

Pada tanggal 29 Juni 2026 telah ditetapkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pada revisi perjanjian kinerja tersebut, perubahan hanya pada pagu anggaran LRBRL menjadi sebesar Rp Rp2.574.875.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan narasi dan target kinerja tidak mengalami perubahan.

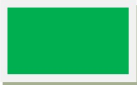
2.4. PENGUKURAN KINERJA

a. Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja LRBRL Triwulan II Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK sehingga diperoleh indeks capaian IKK. Penghitungan indeks capaian IKK perlu memperhitungkan jenis

polarisasi IKK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:

	
Istimewa : Nilai 110 - 120	Baik : Nilai 90 - <110
	
Cukup : Nilai 70 - <90	Kurang : Nilai 50 - <70
	
Sangat Kurang : Nilai 0 - <70	Belum Ada Penilaian

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

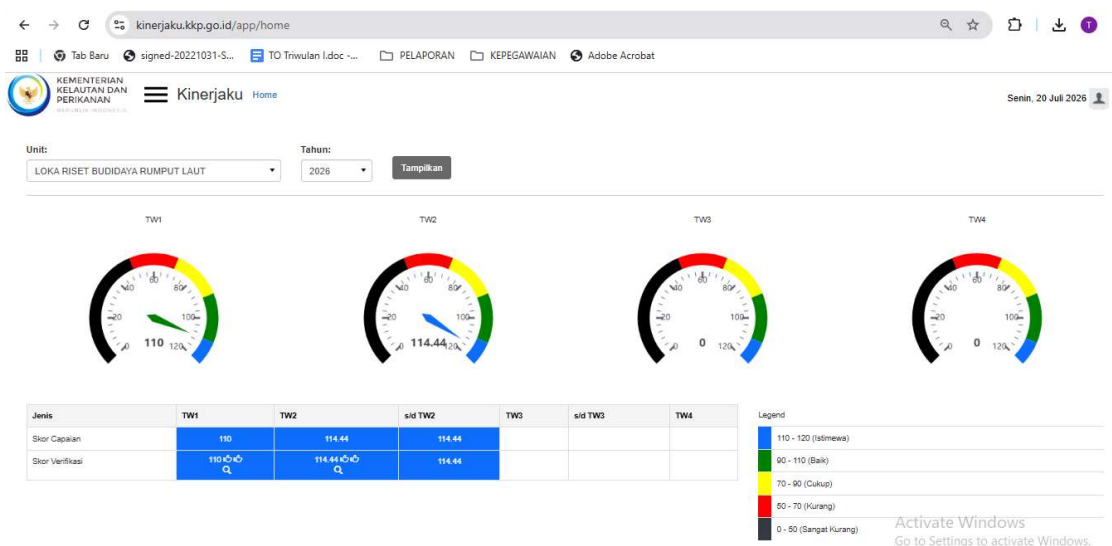
b. Metode Pengukuran

Metode pengukuran kinerja lingkup LRBRL dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja lingkup LRBRL. Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial dan Pelaksana Tata Operasional. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja tahunan dipantau oleh Tim Pengelola SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala LRBRL.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PRESTASI KINERJA

Pengukuran prestasi kinerja LRBRL Triwulan I tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing sasaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku Level 3 LRBRL Gorontalo

Loka Riset Budidaya Rumput Laut memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan dari 1 (satu) Sasaran Kegiatan, 4 (empat) indikator kinerja telah mencapai target dan capaian pada Triwulan II tahun 2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh data capaian kinerja LRBRL Triwulan II tahun 2026 sebesar 114,44%.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target dan capaian dalam tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran strategis.

Tabel 7. Capaian IKK LRBRL Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	%	Status
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	86,00	86,00	100,00	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92,10	99,91	120,00	
	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80,00			
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,75			
	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,55	76,00	117,76	
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	77,00	100	120,00	
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL (Nilai)	71,00			
	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2,00			
	Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90,00			

SK 1 : Terpenuhiya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” didukung 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

IKK 1 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang ditujukan kepada LRBRL dan telah ditindaklanjuti sampai selesai dengan status tuntas, yang dihitung dalam satuan rekomendasi, sampai dengan waktu pengukuran. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan Jumlah Rekomendasi Inspektorat Jenderal yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh LRBRL dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LRBRL kemudian dikalikan 100%. Satker yang tidak ada LHP atau tidak sebagai obyek pengawasan pada periode pelaporan, maka nilai capaian sebesar 86%.

IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Jenis perhitungan data indikator kinerja ini yaitu nilai posisi akhir. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK non direct. Adapun capaian atas IKK ini pada Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut

Tabel 8. Capaian IKK 1 LRBRL Triwulan II tahun 2026

IKK-1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)									
Realisasi TW II				2026				Target Kinerja LRBRL Tahun 2025 -2029	
2022-2025									
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	75	82	85	86	86	100	1.19	89	96.63

Periode pelaporan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dilakukan

triwulanan. Pada Triwulan II tahun 2026 indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditentukan yaitu 86% atau sebesar 100% dari target 86%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada satker LRBRL atau LRBRL tidak menjadi obyek pengawasan pada periode pelaporan. Persentase kenaikan indikator kinerja ini dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2025 sebesar 1,19%. Persentase capaian terhadap target 2029 menurut renstra sebesar 96,63%.

Indikator kinerja ini baru diturunkan ke Loka Riset Budidaya Rumput Laut pada tahun 2023, sehingga pada triwulan II tahun 2022 belum terdapat target maupun capaian untuk indikator tersebut. Pada triwulan II tahun 2023, capaian indikator kinerja tercatat sebesar 75%, meningkat menjadi 82% pada triwulan II tahun 2024. Capaian indikator kinerja ini kembali meningkat menjadi 85% pada Triwulan II tahun 2025. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Nota Dinas Sekretaris BPPSDMKP.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja ini adalah komitmen yang baik dari seluruh pegawai dalam rangka pemenuhan dokumen dukungan manajemen sesuai dengan aturan yang berlaku serta pendampingan dan pengawasan dari Kepala Satker dalam pemenuhan dokumen dukungan manajemen. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja tersebut yaitu menyusun dokumen dukungan manajemen sesuai dengan aturan yang berlaku, monitoring aplikasi SIDAK serta menyusun dan menyampaikan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkala.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah) dengan anggaran sebesar Rp370.000,00 dan belum terealisasi sampai dengan triwulan II tahun 2026 (0,00 %) . Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100,00%.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup BPPSDMKP dapat dilihat pada Tabel 9. Diketahui bahwa realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang

Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL sama dengan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) dan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP). Hal tersebut sesuai dengan dokumen pendukung berupa Nota Dinas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan perihal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2026 Lingkup BPPSDMKP" nomor : 2801/BPPSDM.1/HP.510/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	% Capaian
1	LRBRL	86,00	86,00	100,00
2	LRMPHP	86,00	86,00	100,00
3	LRPT	86,00	86,00	100,00
4	LPTK	86,00	86,00	100,00
5	LRSDKP	86,00	86,00	100,00

IKK 2 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA (10), Deviasi Halaman III DIPA (15), Pengelolaan UP dan TUP (10), Belanja Kontraktual (10), Penyelesaian Tagihan (10), Penyerapan Anggaran (20), Konfirmasi Capaian Output (25) serta Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA). Pengukuran capaian pada IKK ini berdasarkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRBRL yang diperoleh dari MyIntress (*My Integrated Treasury System*) yang merupakan portal utama dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan berbasis digital (<https://myintress.kemenkeu.go.id>). IKK ini menggunakan klasifikasi

maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Jenis perhitungan data indikator kinerja ini yaitu nilai posisi akhir. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu *non direct*.

Tabel 10. Capaian IKK 2 LRBRL Triwulan II tahun 2026

IKK-2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)									
Realisasi TW II				2026				Target Kinerja LRBRL Tahun 2025 -2029	
2022-2025									
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
92,73	98,72	96,41	98,83	83,00	99,91	120,00	1,09	92,20	108,36

Periode pelaporan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dilakukan semesteran, pada triwulan II 2026 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL telah mencapai target sebesar 99,91 atau mencapai 120,00% dari target 83,00. Capaian indikator kinerja ini pada triwulan II 2022 sebesar 92,73. Kemudian mengalami peningkatan capaian pada triwulan II 2023 sebesar 98,72. Sedangkan pada periode triwulan II 2024 capaian indikator kinerja ini menurun yaitu sebesar 96,41. Hal tersebut dikarenakan mundurnya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan di LRBRL, akibatnya penyerapan anggaran tidak dapat optimal dan berdampak pada nilai deviasi halaman III DIPA. Capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan kembali pada triwulan II 2025 sebesar 98,83. Persentase kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dibandingkan capaian pada triwulan II 2025 sebesar 1,09%.

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran yaitu adanya komitmen pegawai yang bertanggungjawab pada kegiatan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi dokumen sesuai dengan aturan yang berlaku serta pendampingan dan pengawasan Kepala Satker dalam kegiatan pelaksanaan anggaran LRBRL. Upaya yang dilaksanakan untuk memenuhi target indikator kinerja ini antara lain: menyesuaikan rencana penarikan dana dan realisasi anggaran dengan melakukan revisi halaman III DIPA, mengoptimalkan realisasi anggaran, mengajukan GUP dan TUP secara tepat waktu, mengisi capaian output

dengan tepat dan cermat serta melakukan monitoring secara berkala pada pengisian capaian output.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah) dengan anggaran sebesar Rp740.000,00 dan telah terealisasi selama triwulan II sebesar Rp739.377,00 (99,92%).

Adapun perbandingan target dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup Sekretariat BPPSDMKP dapat dilihat pada Tabel 11. Diketahui bahwa realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRPT lebih tinggi dibandingkan dengan dengan LRBRL, LRMPHP, LPTK dan LRSDKP. Akan tetapi realisasi LRBRL lebih tinggi dibandingkan dengan LRMPHP, LPTK dan LRSDKP. Hal tersebut dibuktikan oleh Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026 nomor 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	% Capaian
1	LRBRL	83,00	99,91	117,65
2	LRMPHP	83,00	99,44	119,03
3	LRPT	83,00	100,00	116,13
4	LPTK	83,00	97,73	117,02
5	LRSDKP	83,00	98,84	116,57

IKK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP (PM SAKIP) merupakan indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Nilai PM SAKIP Level III BPPSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit LRBRL merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit UPT lingkup BPPSDM. Nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Jenis perhitungan data indikator kinerja ini yaitu nilai posisi akhir. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK direct.

Periode pelaporan indikator kinerja penilaian mandiri SAKIP LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2026 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Progres capaian indikator kinerja ini yaitu mengumpulkan dan menyusun dokumen yang menjadi komponen penilaian mandiri SAKIP yaitu dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selain itu telah dilakukan penilaian mandiri SAKIP satker LRBRL yang dilakukan oleh Tim Monev dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMKP. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Surat/Nota Dinas Sekretaris BPPSDMKP.

Faktor pendukung keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen dari pegawai yang bertanggungjawab untuk memenuhi seluruh dokumen pendukung penilaian mandiri SAKIP serta adanya pendampingan dan pengawasan Kepala Satker dalam memenuhi dokumen pendukung penilaian mandiri SAKIP.

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu memenuhi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Loka Riset Budidaya Rumput Laut selama lima tahun berturut-turut yang meliputi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Selain itu, melakukan koordinasi dengan tim review penilaian mandiri SAKIP BPPSDMKP terkait pemenuhan dokumen pendukung penilaian mandiri SAKIP LRBRL.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II kebawah) sebesar Rp709.500,00 dan belum terealisasi selama triwulan II Tahun 2026 (0,00%).

IKK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Jenis perhitungan data indikator kinerja ini yaitu nilai posisi akhir. Sedangkan metode cascading indikator kinerja ini adalah *non direct*.

Periode pelaporan indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2026 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Progres capaian indikator kinerja ini yaitu memaksimalkan kinerja dalam rangka perencanaan anggaran seperti efektifitas capaian RO dan efisiensi penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK). Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Nota Dinas dari Biro Keuangan dan BMN / Capture Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja ini yaitu adanya komitmen seluruh pegawai untuk memaksimalkan kinerja dalam rangka perencanaan anggaran misalnya kesesuaian penganggaran dengan Standar Biaya Keluaran (SBK). Selain itu, adanya pendampingan dan pengawasan dari kepala satker dalam perencanaan

anggaran serta dalam pengisian aplikasi Monev Kemenkeu dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI Kemenkeu. Upaya yang dilakukan untuk mencapai nilai kinerja perencanaan anggaran LRBRL adalah Mengisi aplikasi Monev Kemenkeu dan Capaian Output pada aplikasi SAKTI Kemenkeu secara berkala yang dilakukan sesuai dengan pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja perencanaan anggaran serta monitoring secara berkala pengisian capaian output. Selain itu, menjaga nilai indeks realisasi anggaran agar selaras dengan indeks SBKU serta melakukan koordinasi dengan baik antara pelaksana perencanaan anggaran dengan pengelola keuangan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp709.500,00 dan belum terealisasi selama triwulan II Tahun 2026 (0,00%).

IKK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No.38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt. Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Jenis perhitungan data indikator kinerja ini menggunakan nilai posisi akhir. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu *non direct*. Adapun capaian atas IKK ini Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian IKK 5 LRBRL Triwulan II Tahun 2026

IKK-5. Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)									
Realisasi TW II				2026				Target Kinerja LRBRL Tahun 2025 -2029	
2022-2025									
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi TW II 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
74,64	71,07	82,89	83,78	76,00	89,50	117,76	6,85	81,70	109,55

Periode pelaporan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRBRL dilakukan semesteran, pada triwulan II 2026 indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 89,50 atau 117,76% dari target sebesar 76,00. Nilai tersebut masih ada kemungkinan akan bertambah sampai dengan triwulan IV tahun 2026 karena pada bulan Juli sampai dengan Desember 2026 pegawai LRBRL masih memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pegawai seperti : pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain. Pada triwulan II 2022 capaian indikator sebesar 74,64. Realisasi capaian indikator kinerja IP ASN pada triwulan II tahun 2023 sebesar 71,07. Sedangkan pada triwulan II tahun 2024, realisasi capaian indikator kinerja IP ASN sebesar 82,89. Capaian IKK ini mengalami peningkatan pada triwulan II 2025 yaitu sebesar 83,78. Peningkatan nilai capaian selama dua periode membuktikan adanya komitmen dari seluruh ASN LRBRL dalam memenuhi target capaian IKK ini. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Nota Dinas/Surat Sekretariat BPPSDMKP.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen dari seluruh ASN LRBRL untuk memenuhi komponen penilaian indikator kinerja ini, antara lain : tingkat pendidikan seluruh ASN LRBRL, keikutsertaan ASN dalam kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh ASN LRBRL melalui kegiatan Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir. Selain itu terdapat komponen kinerja dan disiplin, ASN LRBRL selalu berusaha untuk memenuhi target indikator kinerja individu yang telah

ditetapkan serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tercapainya IKK Indeks Profesionalitas ASN LRBRL tidak terlepas dari upaya yang dilakukan untuk memenuhi target IP ASN LRBRL yaitu dengan menyelesaikan tugas belajar secara tepat waktu. Dalam rangka peningkatan kompetensi, ASN wajib mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, webinar, bimbingan teknis serta workshop. Seluruh ASN LRBRL berusaha memenuhi target capaian indikator kinerja individu untuk memperoleh predikat sesuai ekspektasi dari pimpinan. Selain itu, seluruh ASN LRBRL berusaha mematuhi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsinya. Upaya lain yang telah dilakukan yaitu menyusun rekapitulasi absensi pegawai untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai LRBRL.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan Manajemen SDM dengan anggaran sebesar Rp1.810.000,00 dan hingga akhir triwulan II tahun 2026 belum terealisasi (0,00%).

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) dapat dilihat pada Tabel 13. Diketahui bahwa realisasi indeks profesionalitas ASN LRBRL lebih rendah dibandingkan Satker LRMPHP, LPTK dan LRSDKP. Akan tetapi, capaian IPASN LRBRL lebih tinggi dibandingkan dengan Satker LRPT. Hal ini dibuktikan oleh Nota Dinas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan nomor 2816/BPPSDM.1/KP.720/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Semester I Tahun 2026 lingkup BPPSDM.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	% Capaian
1	LRBRL	73,00	89,50	117,76
2	LRMPHP	76,00	90,53	119,12
3	LRPT	76,00	89,07	117,20
4	LPTK	76,00	90,24	118,74

No	Satuan Kerja	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan II Tahun 2026	% Capaian
5	LRSDKP	76,00	90,80	119,47

IKK 6 : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula pengukuran indikator kinerja ini yaitu dengan membandingkan nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP dengan pagu pengadaan barang/jasa kemudian dikalikan 100%. Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Jenis perhitungan data indikator kinerja ini yaitu nilai posisi akhir. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu non direct. Adapun capaian atas IKK ini Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 14. IKK 6 LRBRL Triwulan II tahun 2026

IKK 6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)									
Realisasi TW II				2026				Target Kinerja LRBRL Tahun 2025 -2029	
2022-2025									
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi TW II Tahun 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	100,00	77,00	100,00	120,00	0,00	80	125,00

Periode pelaporan indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL dilakukan triwulanan. Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator kinerja ini telah mencapai target yang ditentukan yaitu 100% atau 120% dari target 77%. Capaian indikator kinerja ini pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100% dari target 80%. Indikator kinerja ini merupakan turunan dari tingkat pusat dan baru diturunkan ke Loka Riset Budidaya Rumput Laut pada tahun 2025. Oleh karena itu, pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 belum terdapat target maupun capaian untuk indikator kinerja ini. Bukti capaian indikator kinerja ini yaitu Surat/Nota Dinas Biro Pengadaan Barang/Jasa. Persentase capaian terhadap target 2029 menurut renstra sebesar 125,00%.

Faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu komitmen pegawai yang bertanggungjawab dan PPK agar teliti dalam mengisi aplikasi SIRUP sesuai dengan perkembangan informasi terbaru, sehingga tidak ditemukan selisih antara nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan barang/jasa. Selain itu adanya dukungan dari bidang lain yang berkaitan serta pendampingan dan pengawasan oleh Kepala Satker dalam proses pengisian aplikasi SIRUP. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja ini yaitu melakukan koordinasi antara petugas pengisian SIRUP dengan pengelola anggaran terkait adanya revisi anggaran.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan perkantoran dengan anggaran sebesar Rp2.563.507.000,- dan telah terealisasi sebesar

RP1.373.882.883,- (53,59%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 66,41%.

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL dengan satker setingkat Loka di lingkup BPPSDMKP dapat dilihat pada Tabel 15. Diketahui bahwa realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL sama dengan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT), Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) dan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP). Hal tersebut dibuktikan oleh Nota Dinas Sekretaris BPPSDMKP nomor 2798/BPPSDM.1/PL.410/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL dengan Satker Setingkat Loka

No	Satuan Kerja	Target TW II Tahun 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	% Capaian
1	LRBRL	77,00	100%	120,00
2	LRMPHP	77,00	100%	120,00
3	LRPT	77,00	100%	120,00
4	LPTK	77,00	100%	120,00
5	LRSDKP	77,00	100%	120,00

IKK 7 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai



dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengukuran pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terdiri dari dua aspek utama dengan bobot yaitu 70% pengelolaan arsip dinamis dan 30% sumber daya kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip, sedangkan sumber daya kearsipan meliputi SDM kearsipan serta prasarana dan sarana.

Indikator kinerja ini diukur dalam bentuk nilai dengan tingkat validitas indikator kinerja ini yaitu output dengan kendali rendah. Jenis perhitungan data indikator kinerja ini yaitu nilai posisi akhir. Metode cascading yang digunakan adalah non direct, dengan polarisasi maximize (semakin tinggi nilai semakin baik). IKK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL merupakan indikator kinerja yang baru diturunkan ke LRBRL pada tahun 2026. Periode pelaporan dilakukan secara tahunan, dengan bukti dukung berupa surat atau nota dari Sekretaris BPPSDMPKP. Progres capaian indikator kinerja ini yaitu terdatanya surat masuk dan keluar lingkup LRBRL, tersusunnya beberapa dokumen pendukung penilaian pengawasan kearsipan LRBRL serta terdatanya sarana dan prasarana kearsipan LRBRL. Selain itu, telah dilakukan pengisian data instrument pengawasan kearsipan serta penilaian mandiri pengawasan kearsipan internal lingkup BPPSDMPKP.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen dari pegawai yang bertugas pada bidang kearsipan untuk memenuhi seluruh dokumen pendukung penilaian pengawasan kearsipan internal LRBRL serta adanya pendampingan dan pengawasan dari Kepala LRBRL dalam memenuhi dokumen pendukung penilaian pengawasan kearsipan internal LRBRL. Kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi target indikator kinerja ini yaitu melakukan pendataan surat masuk dan surat keluar lingkup LRBRL, mengumpulkan dokumen pendukung

penilaian pengawasan kearsipan internal LRBRL serta melakukan pendataan sarana dan prasarana kearsipan LRBRL.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan umum dengan anggaran sebesar Rp370.000,00 dan hingga akhir triwulan II tahun 2026 belum terdapat realisasi (0,00%).

IKK 8 : Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)

Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Loka Riset Budidaya Rumput Laut. Metode pengukuran IKK ini yaitu jumlah kemitraan yang terjalin dan masih berlaku pada tahun berjalan dan pelaporan IKK dilakukan secara tahunan. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Jenis perhitungan data indikator kinerja ini yaitu nilai posisi akhir. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu *non direct*.

Periode pelaporan indikator kinerja Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL dilakukan tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2026 tidak terdapat target dan capaian pada indikator kinerja ini. Sampai dengan triwulan II tahun 2026 Indikator Kinerja Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti LRBRL telah mencapai target sebanyak 3 kemitraan, yaitu kemitraan LRBRL dengan Universitas Negeri Gorontalo dan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai yang ditandatangani pada tahun 2023. Kerjasama LRBRL dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Mendukung *Smart Fisheries Village* (SFV) / Desa Perikanan Cerdas UPT yang disepakati pada 24 Oktober 2023. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini selama 3 tahun. Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan UNG yaitu Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung kegiatan



prioritas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu *Smart Fisheries Village* (SFV) serta Optimalisasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam *Smart Fisheries Village* (SFV) UPT.

Kerjasama LRBRL dengan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Budidaya Rumput Laut Mendukung *Smart Fisheries Village* (SFV) / Desa Perikanan Cerdas UPT yang disepakati pada 13 November 2023. Jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama ini selama 3 tahun. Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan SMK Negeri 1 Paguyaman Pantai yaitu Dukungan kegiatan pendidikan, antara lain : studi lapang dan praktik kerja industri terkait dengan teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut serta Pertukaran informasi teknologi budidaya, pengolahan dan pemanfaatan hasil budidaya rumput laut.

Pada tahun 2025 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara LRBRL dengan Universitas Tadulako dengan jangka waktu hingga 2028 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya. Ruang lingkup yang disepakati yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui sharing season/praktisi mengajar, magang atau pratek kerja lapang, penyusunan modul/bahan ajar, pelaksanaan bimbingan teknis, kajian/riset bersama di bidang kelautan dan perikanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendukung kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

Faktor yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya inisiatif diantara kedua belah pihak dan semua pihak telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan tertib administrasi. Selain itu adanya komitmen diantara kedua belah pihak untuk menjalankan Kerjasama dengan baik serta adanya monitoring dari kedua belah pihak selama perjanjian kerjasama berjalan.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi sebesar Rp3.329.500,00 dan hingga akhir triwulan II tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp1.728.000,00 (25,95%).

IKK 9 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)

Nilai keterbukaan informasi publik yaitu suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021, memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit. Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,5. Memiliki nilai komponen hasil “Pelaksanaan Publik yang Prima” minimal 14. Pengukuran IKK ini merupakan hasil penilaian melalui LKE SAQ (*Self Assessment Questioner*) Tim Penilai Internal BPPSDM KP. IKK ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan dan pelaporan IKK dilakukan secara tahunan. Tingkat validitas indikator kinerja yaitu output kendali rendah. Jenis penghitungan data indikator kinerja ini yaitu nilai posisi akhir. Metode cascading pada indikator kinerja ini yaitu IKK *non direct*.

Periode pelaporan Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL dilakukan tahunan, sehingga tidak ada target dan capaian pada periode ini. Indikator kinerja ini baru diturunkan ke LRBRL pada tahun 2025. Target Indikator kinerja ini pada tahun 2025 yaitu 90%. Sampai dengan triwulan II tahun 2026, progres yang telah dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik LRBRL yaitu mengoptimalkan informasi pada website PPID, membuat daftar hadir kunjungan ke PPID menggunakan google form serta melakukan pengisian form LKE.

Faktor yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen pegawai untuk memenuhi data dukung penilaian keterbukaan informasi publik. Selain itu dilakukan monitoring secara rutin terhadap perkembangan kegiatan oleh tim monitoring dan evaluasi serta Kepala Satker. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi target indikator kinerja ini adalah memenuhi dokumen pendukung penilaian keterbukaan informasi publik serta koordinasi yang baik antara pelaksana PPID dengan seluruh pegawai dalam memenuhi dokumen pendukung penilaian

keterbukaan informasi publik. Petugas PPID telah mengikuti kegiatan bimbingan teknis pelayanan publik.

Anggaran yang mendukung IKK ini adalah kegiatan layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi sebesar Rp3.329.500,00 dan hingga akhir triwulan II tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp1.728.000,00 (25,95%).

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

LRBRL pada Triwulan II Tahun 2026 memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.574.875.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada kegiatan dukungan manajemen internal lingkup BPPSDMKP. Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.376.350.260,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau sekitar 53,45%. Dari realisasi tersebut, dapat diperoleh capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja dengan kinerja istimewa dan 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kinerja baik. Berikut ini rincian pagu dan realisasi anggaran per jenis belanja dan per sasaran kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026.

Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2026

Jenis Belanja	Pagu Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
Belanja Pegawai	1.323.497.000	759.656.136	57,40
Belanja Barang	1.251.378.000	614.226.747	49,08
TOTAL	2.574.875.000	1.376.350.260	53,45

Selama Triwulan II tahun 2026, LRBRL melakukan revisi anggaran sebanyak 4 (empat) kali dikarenakan adanya perkembangan kebijakan. Berikut kronologis Revisi anggaran LRBRL selama Triwulan II tahun 2026:

Tabel 17. Revisi DIPA LRBRL Triwulan II tahun 2026

Revisi DIPA ke -	Tanggal	PAGU	PENGESAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	4
01 Kewenangan DJA	31 Desember 2025	2,742,305,000	Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025, Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025, dan surat Kepala BPPSDMKP Nomor B.2769/BPPSDM/RC.420/XII/20	Pengesahan revisi anggaran RO khusus lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Revisi DIPA ke -	Tanggal	PAGU	PENGESAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	4
			25 tanggal 19 Desember 2025	Manusia Kelautan dan Perikanan
02 Kewenangan Kanwil	18 Februari 2026	2.742.305.000	nomor S-231/WPB.29/2026	Pengesahan revisi anggaran ke-2 untuk satker Loka Riset Budidaya Rumput Laut
03 Kewenangan DJA	24 April 2026	2.574.875.000	S-247/AG/AG.3/2026	Pengesahan Revisi Anggaran Penajaman Belanja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan TA 2026
04 Kewenangan Kanwil	8 Mei 2026	2.574.875.000	S-494/WPB.29/2026	Pengesahan Revisi Anggaran ke-4 untuk satker Loka Riset Budidaya Rumput Laut (403833)

Pagu anggaran LRBRL yang bersumber dari APBN dipergunakan untuk membiayai capaian 9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam 1 Sasaran Kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan". Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2026 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 18. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan II tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	370.000	0	0,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	740.000	739.377	99,92
		Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	709.500	0	0,00
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	709.500	0	0,00
		Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	1.810.000	0	0,00
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	2.563.507.000	1.373.882.883	53,59
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL (Nilai)	370.000	0	0,00
		Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	3.329.500	864.000	25,95
		Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	3.329.500	864.000	25,95
	TOTAL		2.574.875.000	1.376.350.260	53,45

1.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

1.4.1. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dihitung dengan cara menghitung selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase anggaran. Semakin besar persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase anggaran, maka akan semakin besar nilai efisiensinya.

Tabel 19. Rincian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Indikator Kinerja Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan		Indikator Kinerja			Kegiatan Pendukung RKA KL	Anggaran (Rp.)			Efisiensi (%)
		Target	Capaian	%		Pagu	Realisasi	%	
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	86	86	100,00	Layanan BMN	370.000	0	0,00	100
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	83,00	99,91	120,00	Layanan Keuangan	740.000	739.377	0,00	0
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	709.500	0	0,00	0
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,75			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	709.500	0	0,00	0
5	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	76,00	89,50	117,76	Layanan Manajemen SDM	1.810.000	0	0,00	0
6	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	77	100	120,00	Layanan Perkantoran	2.563.507.000	1.373.882.883	27,02	92,98

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan		Indikator Kinerja			Kegiatan Pendukung RKA KL	Anggaran (Rp.)			Efisiensi (%)
		Target	Capaian	%		Pagu	Realisasi	%	
7	Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL (Nilai)	71			Layanan Umum	370.000	0	0,00	0
8	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.329.500	864.000	0,00	0
9	Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90			Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.329.500	864.000	0,00	0
Total				114,44		2.574.875.000	1.376.350.260	53,45	60,99

1.4.2. Alokasi Sumber Daya

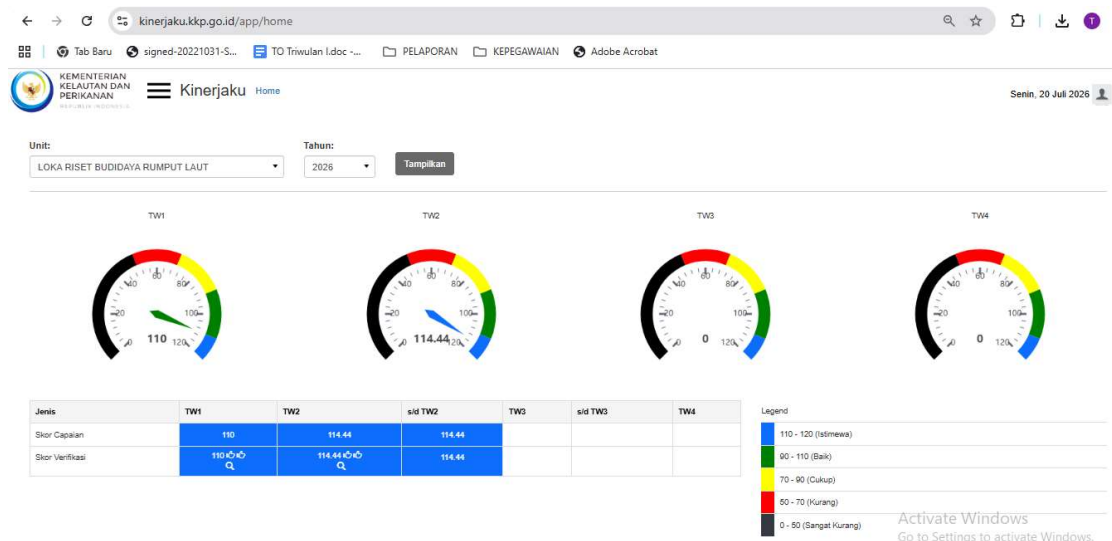
Jumlah sumber daya manusia Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) pada Triwulan II tahun 2026 sebanyak 24 orang yang terdiri dari 13 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 11 orang Tenaga Penyedia Jasa lainnya Perorangan (PJLP) petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas tambak. Berdasarkan jabatan fungsional, sampai dengan saat ini LRBRL hanya memiliki 2 orang pegawai yang menduduki jabatan fungsional yaitu 1 orang pranata keuangan APBN mahir dan 1 orang pranata hubungan masyarakat ahli pertama. Jumlah pegawai dengan jabatan fungsional umum sebanyak 9 orang bertugas pada kegiatan manajerial sebagai pengolah data dan informasi, penelaah teknis kebijakan, penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, pengadministrasi perkantoran dan operator layanan operasional. Berdasarkan kondisi tersebut, LRBRL mampu memperoleh capaian berstatus biru (istimewa) pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Selain itu, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja kegiatan telah dicapai dengan status hijau (baik).

Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh LRBRL yaitu berupa sarana dan prasarana yang terdiri dari : tanah bangunan kantor pemerintah, tanah tambak, gedung kantor, gedung laboratorium, *guest house* dan lain-lain. Beberapa sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sebagai sumber PNPB LRBRL.

IV PENUTUP

4.1. CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan visi dan misi Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL), pada Triwulan II Tahun 2026 LRBRL menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRBRL dengan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 1 (satu) Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai. Untuk setiap Sasaran Kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan. Keseluruhan Indikator Kinerja Kegiatan LRBRL pada tahun 2026 berjumlah 9 (sembilan). Pengukuran capaian kinerja LRBRL Triwulan II Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) menggunakan aplikasi berbasis *logical framework* pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku Level 3 LRBRL Gorontalo

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRBRL Triwulan II tahun 2026 sebesar 114,44% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 20. Capaian IKK LRBRL Triwulan II tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	%	Status
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	86,00	86,00	100,00	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92,10	99,91	120,00	
	Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80,00			
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,75			
	Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,55	76,00	117,76	
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	77,00	100	120,00	
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL (Nilai)	71,00			
	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2,00			
	Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90,00			

Data dukung capaian kinerja LRBRL Triwulan II tahun 2026 telah diunggah melalui tautan : https://bit.ly/Kinerja_LRBRL_Triwulan2_2026 .

Realisasi anggaran sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp1.376.350.260,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau sekitar 53,45% dari total pagu anggaran sebesar Rp2.574.875.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LRBRL triwulan II tahun 2026 mengalami Kenaikan senilai 3,21% bila dibandingkan dengan triwulan II Tahun sebelumnya (2025) yaitu dari 111,23% menjadi 114,44%.

4.2. PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2026, beberapa indikator kinerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut yaitu kurangnya jumlah SDM yang melaksanakan kegiatan manajerial sehingga pegawai yang ada harus melakukan rangkap tugas dan juga dikhawatirkan menimbulkan resiko tinggi yang berdampak pada capaian kinerja LRBRL.

4.3 REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang terjadi selama proses pencapaian target kinerja triwulan II tahun 2026, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan tugas tambahan kepada pegawai dari bidang tugas lainnya
2. Menyampaikan kebutuhan ASN agar diberikan penambahan jumlah SDM untuk mengisi kekosongan jabatan atau tugas di LRBRL baik dari penerimaan CPNS, PPPK atau dari mutasi pegawai yang berasal dari sakter lain.

4.4 TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI TRIWULAN II TAHUN 2025

Sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja tahun 2026, LRBRL telah melakukan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Kinerja triwulan II tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 21. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Triwulan II Tahun 2026

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Status
1.	Mengusulkan penambahan jumlah SDM untuk mengisi kekosongan jabatan atau tugas di LRBRL baik dari penerimaan CPNS, PPPK atau dari mutasi pegawai yang berasal dari sakter lain.	Membuat Surat Keputusan Kepala LRBRL tentang Penetapan tugas tambahan pegawai serta menyusun data kebutuhan jumlah SDM LRBRL	- Telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala LRBRL Nomor : 13/LRBRL/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Tugas Tambahan Pegawai Untuk Kegiatan Operasional Perkantoran Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2026. - Telah disusun data rencana pemenuhan kebutuhan jumlah SDM LRBRL Tahun 2025-2029
2.	Melakukan percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.	Mempercepat realisasi belanja pegawai dan belanja barang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan	Telah dilaksanakan belanja pegawai dengan belanja barang sesuai dengan rencana yang ditetapkan

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Januari 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppe@kp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinel Ponto
Jabatan : Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Joni Haryadi D
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rinel Ponto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRBRL (%)	88
		2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	92,1
		3. Penilaian Mandiri SAKIP LRBRL (Nilai)	80
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRBRL (Nilai)	71,75
		5. Indeks Profesionalitas ASN LRBRL (Indeks)	81,55
		6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP LRBRL (%)	77
		7. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRBRL (Nilai)	71
		8. Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti LRBRL (Kemitraan)	2
		9. Keterbukaan Informasi Publik LRBRL (%)	90

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2.742.305.000
Total Anggaran Loka Riset Budidaya Rumput Laut Tahun 2026		2.742.305.000

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Loka Riset Budidaya
Rumput Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rinel Ponto